

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel selama periode 2020–2024 terutama dipengaruhi oleh *economic capabilities* sebagai faktor utama. Keterbatasan modal, teknologi, dan kapasitas industri domestik menciptakan kebutuhan Indonesia terhadap investasi asing untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi nikel. Dalam kondisi tersebut, Tiongkok menjadi mitra yang memiliki kemampuan modal, teknologi pengolahan, dan kapasitas pembangunan industri yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dengan demikian, keputusan Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan sumber daya nikel, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan kapabilitas ekonomi domestik dalam merealisasikan agenda hilirisasi.

Selain *economic capabilities*, *natural resources* berperan sebagai faktor daya tarik, karena kekayaan cadangan nikel Indonesia menciptakan nilai strategis dan ekonomi yang menarik bagi investasi Tiongkok. Sementara itu, *political system* berperan sebagai faktor institusional yang menerjemahkan kepentingan terhadap hilirisasi dan kebutuhan investasi ke dalam berbagai kebijakan negara, baik melalui pembatasan ekspor bijih nikel maupun melalui pemberian insentif dan penyederhanaan regulasi investasi. *Demography* kemudian menjadi faktor pendukung melalui ketersediaan tenaga kerja yang menunjang operasional industri

pengolahan nikel. Keempat atribut tersebut menunjukkan tingkat peran yang berbeda, dengan *economic capabilities* sebagai faktor utama, *natural resources* sebagai faktor daya tarik, *political system* sebagai faktor institusional, dan *demography* sebagai faktor pendukung.

Sementara itu, *size*, *geography*, dan *military capabilities* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks kebijakan penerimaan investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel selama periode penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa relevansi atribut nasional bersifat kontekstual dan tidak seluruh atribut nasional harus berperan dalam setiap kebijakan luar negeri. Dalam kasus ini, keputusan Indonesia lebih berkaitan dengan kebutuhan kapabilitas ekonomi, ketersediaan sumber daya strategis, kapasitas institusional, dan kondisi pendukung di dalam negeri. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam menerima investasi Tiongkok pada sektor hilirisasi nikel dibentuk terutama oleh faktor ekonomi dan sumber daya yang kemudian diterjemahkan melalui mekanisme institusional negara, dengan demografi sebagai kondisi pendukung.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas penggunaan perspektif *Foreign Policy Analysis* di luar atribut nasional yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis pada level *domestic politics* dapat digunakan untuk mengkaji pengaruh kepentingan dan interaksi aktor domestik dalam proses perumusan kebijakan, sedangkan perspektif *leader decision-making* dapat digunakan untuk melihat pengaruh persepsi, preferensi, dan pertimbangan pemimpin dalam menentukan keputusan penerimaan investasi Tiongkok. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat

menggunakan *international system level* untuk menganalisis pengaruh perubahan lingkungan internasional, persaingan kekuatan besar, serta perkembangan rantai pasok nikel global terhadap kebijakan Indonesia. Penggunaan perspektif tersebut diharapkan dapat melengkapi pendekatan atribut nasional dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam sektor hilirisasi.

Secara praktis, Indonesia perlu mengoptimalkan manfaat investasi asing sekaligus mengurangi potensi ketergantungan terhadap satu mitra melalui diversifikasi mitra investasi, khususnya dengan memperluas kerja sama dengan negara yang memiliki kapasitas modal dan teknologi seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Diversifikasi tersebut perlu disertai dengan penguatan transfer teknologi agar investasi asing tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga meningkatkan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja dan perusahaan nasional. Pada saat yang sama, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas industri nasional melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi domestik, perusahaan nasional, dan kemampuan penguasaan rantai nilai industri nikel. Langkah tersebut penting untuk memperkuat *economic capabilities* Indonesia sehingga dalam jangka panjang Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan mitra dan arah kerja sama investasi di sektor hilirisasi nikel.